

MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP PEMBELAJARAN

Gilang Muhamad Fajri Faresi¹, Irwan Ruswandi², Fahad Abdusomad³, Qiqi Yuliati Zakiah⁴

¹STIES Saleh Budiman

²Institut Agama Islam Sukabumi

^{3,4}UIN Sunan Gunung Djati

Email: gilangfaresi@gmail.com¹, irwanruswandi@iais.sc.id², fahadabdusomad1991@gmail.com³,
qiqiyuliatizakiah@uinsgd.ac.id⁴

Abstrak: Kebijakan pendidikan berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas proses belajar di setiap tingkat pendidikan. Untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan memberikan hasil yang baik, diperlukan pendekatan yang sistematis melalui model analisis kebijakan pendidikan. Model ini digunakan untuk menemukan permasalahan pendidikan, mencari berbagai kemungkinan solusi, serta menilai dampak kebijakan yang diterapkan terhadap proses belajar. Ada beberapa model analisis yang digunakan, seperti model rasional, model bertahap, dan model campuran. Setiap model memiliki cara berbeda dalam mengambil keputusan tentang kebijakan. Model rasional menekankan pada proses yang logis dan terstruktur dalam memilih solusi terbaik berdasarkan data dan bukti yang ada. Sedangkan model bertahap lebih mengutamakan perubahan kecil secara bertahap dan memperhatikan situasi sosial serta politik. Model campuran menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan solusi yang lebih fleksibel dan realistis. Dengan memakai model-model tersebut, pembuat kebijakan dapat membuat kebijakan pendidikan yang tidak hanya bagus dari segi teori tetapi juga bisa diterapkan di lapangan dan sesuai dengan kondisi nyata. Hasilnya, proses belajar akan menjadi lebih efektif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan siswa serta tantangan dalam era sekarang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap model analisis kebijakan pendidikan sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam pendidikan agar dapat membuat keputusan yang positif dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Model Kebijakan dan Pembelajaran.

Abstract: Education policy plays a crucial role in determining the direction and quality of the learning process at every level of education. To ensure that these policies are on target and deliver positive results, a systematic approach is required through an education policy analysis model. This model is used to identify educational problems, explore possible solutions, and assess the impact of implemented policies on the learning process. Several analytical models are used, such as the rational model, the stepwise model, and the mixed model. Each model has a different approach to policy decision-making. The rational model emphasizes a logical and structured process for selecting the best solution based on available data and evidence. The stepwise model, on the other hand, prioritizes small, gradual changes and takes into account social and political situations. The mixed model combines both approaches to produce more flexible and realistic solutions. By using these models, policymakers can create educational policies that are not only theoretically sound but also applicable in the field and aligned with

real-world conditions. As a result, the learning process will be more effective, relevant, and able to address student needs and the challenges of the current era. Therefore, understanding educational policy analysis models is crucial for those involved in education to make positive decisions and help improve the quality of learning sustainably.

Keywords: *Education Policy, Policy Models, and Learning.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah fondasi utama dalam perubahan suatu bangsa, melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah, proses, dan hasil dari sistem pendidikan nasional. Namun, banyaknya persoalan kompleks pendidikan sering kali menuntut analisis yang komprehensif dan sistematis dalam perumusan kebijakannya. Oleh karena itu, model analisis kebijakan pendidikan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, evidensi, serta mempertimbangkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan politik (Ishak, 2023, p. 78).

Model analisis kebijakan pendidikan memenuhi kerangka kerja dalam mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan, mengidentifikasi alternatif solusi, serta memprediksi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Berbagai pendekatan analitis seperti model rasional, *change theory*, *incremental*, *mixed scanning*, hingga model advokasi-koalisi, telah digunakan untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan di berbagai konteks, baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, dinamika kebijakan pendidikan masih memiliki persoalan oleh tantangan dalam perumusan yang kurang partisipatif, lemahnya implementasi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan lokal (Wildan Fathoni, 2025)

Kurangnya penggunaan model analisis yang sesuai dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan bersifat reaksioner dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam peran model analisis kebijakan dalam proses formulasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks Indonesia yang multikultural dan desentralistik. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana model-model analisis kebijakan pendidikan dapat digunakan secara proporsional dalam mendukung perumusan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti, serta memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan (Hidayatullah, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam sudah jelas, untuk membentuk peserta didik yang bertaqwa dan menghambakan diri kepada Allah SWT melalui ibadah. Pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, tetapi ada proses pembentukan karakter dan spiritual yang menjadikan manusia sadar mengenai tujuan hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah yang telah diturunkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dengan memahami bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah, pendidikan harus diarahkan untuk menjadikan peserta didik menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah sebagai penghamba terhadap sang pencipta.

Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan penting dalam membimbing manusia untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagai hamba yang taat sekaligus utusan di muka bumi, sehingga tercipta insan yang pengabdian bermakna dan selaras dengan tujuan penciptaannya. Jika dikaitkan dengan pendapat Zakiyah Daradjat bahwa tujuan umum pendidikan Islam itu menjadikan manusia sebagai insan kamil dengan cara takwa kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa dalam bentuk insan kamil masih perlu memperoleh pendidikan untuk pengembangan diri dan penyempurnaan, setidaknya mampu menjaga kesempurnaannya supaya tidak luntur atau berkurang (Wildan Fathoni, 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam riset penelitian, penulis menggunakan metode penelitian studi literatur atau dikenal juga dengan *literature review* yaitu bersumber dari beberapa buku bacaan dan penelitian - penelitian terdahulu. Pada metode ini dilakukan telaah sistematis terhadap beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan penelitian penulis yang diajukan yaitu peran atau pengaruh kebijakan pendidikan terhadap kemajuan bangsa (Nisa Firdha, 2021, p. 108)

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur atau research library. Pencarian literatur untuk mendapatkan sumber data yang relevan dan terpercaya, seperti jurnal, artikel dan buku-buku terkait mengenai model kebijakan pendidikan (Titin Sunaryati, 2024). Kemudian mengevaluasi sumber data yang ditemukan yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga tereduksi hasil yang kita temukan. Selanjutnya memilih literatur yang relevan dan melakukan analisis data dengan pengumpulan, pengorganisasian, dan pemilihan data yang relevan (Hadi, 2023, p. 1677).

Langkah selanjutnya adalah analisis SWOT dimana menilai dan menjelaskan faktor-faktor dalam dan luar yang bisa memengaruhi pelaksanaan kebijakan agar tujuan atau hasil yang diinginkan tercapai. Setelah itu, dipilih faktor-faktor mana yang mendukung dan mana

yang tidak mendukung dalam rencana yang akan dijalankan. Setelah analisis data selesai dilakukan, dilanjutkan dengan menentukan rencana mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Anesti Rohma Wardani, 2022, p. 89).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan menurut istilah bisa diartikan sebagai politik, program, keputusan, aturan, konferensi, ketentuan, rencana strategis, serta pendapat atau istilah lainnya yang relevan. Kebijakan juga bisa menjadi suatu rencana dasar dalam melakukan pekerjaan, bisa digunakan dalam kepemimpinan di pemerintahan untuk bertindak dan memberikan keputusan yang sudah disepakati, serta bisa digunakan dalam organisasi untuk merancang pernyataan cita-cita yang menjadi tujuan (Anesti Rohma Wardani, 2022).

Kebijakan Pendidikan Indonesia merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini mempunyai sebuah pencapaian yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan, serta memenuhi aspek legal-formal dan memiliki konsep operasional yang dapat diaplikasikan (Daud, 2024, p. 89).

Kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan pendidikan di Indonesia juga harus memenuhi aturan konstitusi dan dianggap sah serta resmi berlaku di seluruh wilayah. Selain itu, Ujian Nasional (UN) yang diadakan di Indonesia juga sering dikritik karena tidak mampu menilai kemampuan siswa secara menyeluruh dan merugikan kinerja guru serta siswa (Anesti Rohma Wardani, 2022).

Landasan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah instrument dalam sebuah aturan dalam undang-undang sebagai fundamentas dari sistem pendidikan Indonesia, hal ini berdasarkan acuan peraturan bangsa yaitu Undang-undang dasar 1945. Dalam cakupan UUD 45 yaitu UU Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Adapun contoh kebijakan pemerintah dalam pendidikan diantaranya:

Terlihat Dalam pembukaan UUD 1945, antara lain: “Atas berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” (Tawa, 2019, p. 112)

Selanjutnya dalam pasal 31 undang-undang 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Adapun secara perturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 yang berisi bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta undang-undang no 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Shelvia Permata Sari, 2023).

Analisis Kebijakan Pendidikan

Istilah "kebijakan" adalah kata padanan dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris, yang merujuk kepada pengelolaan permasalahan, kepentingan umum, atau dapat juga merujuk pada administrasi pemerintahan untuk memperoleh permasalahan. Analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk memperoleh pemahaman dalam proses pembuatan kebijakan (Dedi Susanto, 2023).

Analisis kebijakan pendidikan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena menentukan arah dan pedoman yang diikuti. Kebijakan pendidikan tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintah atau pihak yang memiliki wewenang di sebuah instansi. Dengan melakukan analisis kebijakan, kita bisa mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau

pihak pengelola pendidikan secara tepat dan jelas (Hendra Mahardika, 2023, p. 52).

Analisis kebijakan diperoleh manusia yang berpikir, tentu telah lama dikenal dalam memecahkan masalah publik. Pendekatan ini melibatkan pemecahan masalah publik melalui argumentasi rasional, yang perlu dilakukan dalam kerangka disiplin ilmu sosial terapan. Implementasi argumentasi rasional ini dapat disediakan dukungan penjelasan dan penilaian dalam menyelesaikan masalah publik. Kebijakan dalam pandangan berbeda dapat diartikan sebagai prosedur dalam memecahkan permasalahan melalui memanfaatkan pemahaman manusia itu sendiri.

Proses analisis kebijakan adalah cara yang digunakan untuk mengatur dan memandu studi ilmu sosial. Selain itu, proses ini juga melibatkan pengumpulan berbagai argumen dan penggunaan informasi yang tersedia agar bisa menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu kebijakan. Kata "kebijakan" merujuk pada tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi masalah dalam suatu lingkungan. Dengan demikian, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah umum yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah di bidang tertentu, terutama di bidang pendidikan (Dedi Susanto, 2023, p. 98)

Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Karakteristik adalah pernyataan yang bisa menunjukkan ciri khas dari suatu hal. Membicarakan hal ini tidak dianggap remeh, tetapi hal ini harus benar-benar diperhatikan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu kebijakan adalah dengan memperhatikan hal-hal kecil namun penting, seperti karakteristik kebijakan pendidikan. Adanya karakteristik ini berfungsi sebagai pedoman dalam membuat keputusan dalam menetapkan kebijakan pendidikan (Anisa Nuraida Rahmah, 2022).

Dalam analisis kebijakan pendidikan, berbagai informasi yang masuk, seperti hasil penelitian dari para ahli tentang layanan pendidikan, digabungkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rekomendasi penelitian tersebut. Pertama Kegiatan inti dalam analisis kebijakan pendidikan terdiri dari pengumpulan informasi secara lengkap serta penarikan kesimpulan dengan prinsip logis. kedua informasi menjadi sumber utama dalam kajian analisis kebijakan, terutama hasil penelitian. Terakhir yaitu hasil penelitian dalam analisis kebijakan merupakan produk dari proses pengolahan data penelitian yang siap digunakan untuk membantu pengambilan keputusan serta merancang kebijakan pendidikan (Mongdong, 2025, p. 345).

Karakteristik analisis kebijakan dapat dijabarkan secara garis besar bahwa karakteristik memiliki urgensi yang besar. Salah satu urgensi yang besar diantaranya melihat yang kecil dalam kebijakan, itulah hal yang sangat penting. Karakteristik dalam kehadirannya sebagai rujukan dalam membuat suatu kebijakan dalam menetapkan kebijakan pendidikan. Maka dapat dijabarkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki 6 karakteristik yaitu: pertama analisis kebijakan pendidikan memiliki tujuan dalam pencapaian yang dalam hal tersebut memiliki ketepatan dalam target ketercapaian yang menjadikan pendidikan memiliki hasil dalam ketercapaian. Kedua kebijakan pendidikan harus memiliki situasi dan kondisi yang aman secara hukum. Tentu hal itu harus disesuaikan dengan kebijakan konstitusi negara hingga wilayah atau daerah sehingga mampu berjalan secara aman dan nyaman. Ketiga dimana kebijakan pendidikan sebagai dasar yang harus memiliki esensi dalam operasional yang harus dilaksanakan. Hal tersebut tentu penting untuk mendukung keputusan untuk pencapaian. Selanjutnya kebijakan tersebut tentu harus dibuat melalui yang berwenang atau orang yang memiliki sebuah kompetensi dalam hal yang diperlukan dalam output atau hasil kebijakan. Keseluruhan tersebut tentu kebijakan pendidikan merupakan bagian dari sistem, sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terakhir jelas kebijakan pendidikan harus memiliki evaluasi yang menjadikan kebijakan tersebut dapat diperbaiki (Anisa Nuraida Rahmah, 2022, pp. 1924-1926).

Tujuan Kebijakan Pendidikan

Tujuan secara global memiliki tujuan yang sangat penting dalam untuk meningkatkan proses dan strategi pendidikan. melalui standar pendidikan hingga output dalam pembelajaran. Kebijakan pendidikan menjadi landasan utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam proses ini, kebijakan menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas, inklusi, dan realisasi.

Kebijakan pendidikan yang berkualitas harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan tantangan di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting untuk menghasilkan generasi yang inovatif, cerdas, dan siap menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis (Tengku Darmansah, 2025)

Kebijakan Pendidikan memiliki keterkaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan dapat memberikan harapan dalam menentukan kebijakan pendidikan, tujuan kebijakan dalam pendidikan memiliki tujuan yang terstruktur dalam pengambilan keputusan. Tentu dengan menetapkan suatu tujuan pasti memiliki pencapaian. Maka tujuan dalam

kebijakan pendidikan terbagi dalam beberapa hal yaitu Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan masyarakat Kebijakan yang berdasar pada tingkatan masyarakat sendiri, dapat telaah dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Selanjutnya dalam pendidikan sendiri dilatih pula nilai-nilai kebikan kepada seseorang, maka dari hal tersebut nantinya individu-individu ini memahami mana yang dianggap itu baik dan juga mana yang dianggap itu buruk. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi Dimana dalam sebuah tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan politisi ini dapat kita telusuri dari kontribusi pendidikan pada perkembangan politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Pendidikan disini menolong para peserta didik khususnya dalam membangun sikap serta ketrampilan kewarganegaraan yang positif guna membentuk warga negara yang benar serta bertanggung jawab. Disisi lain juga, orang yang terpelajar diharapkan juga mempunyai kesadaran serta tanggung jawab khususnya pada bangsa dan juga negara yang mana lebih baik dari pada orang kurang terpelajar (Anisa Nuraida Rahmah, 2022).

Model Formulasi Kebijakan

Model Formulasi dalam kebijakan terutama dalam kebijakan pendidikan berfungsi untuk merancang dan menyusun kebijakan yang akan diterapkan. Adapun sub model sebagai berikut:

1. Model Kelembagaan (*institutionalisme*) Model kelembagaan merupakan model yang dibuat berasal dari kebijakan publik pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan atas kebijakan publik yang dikeluarkan, model tersebut bersandar pada fungsi dari seluruh lembaga pemerintah. Dye berpendapat bahwa lembaga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tiga ciri yaitu: pertama lembaga Negara memberikan pengesahan atau legitimasi, kedua kebijakan Negara itu bersifat global yang berarti hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disebarluaskan, ketiga pemerintah yang memiliki hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan kepada Masyarakat (Wildan Fathoni, 2025).

Model kelembagaan memiliki prinsip bahwa pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas pembuatan kebijakan. Semua kebijakan yang dihasilkan pemerintah dianggap sebagai kebijakan publik yang sah dan memiliki legitimasi dari lembaga negara. Kebijakan ini bersifat global dan dapat dimonopoli serta dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, model kelembagaan sangat cocok diterapkan dalam perumusan kebijakan pendidikan di sektor pemerintahan, karena pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengarahkan pelaksanaan

kebijakan tersebut. Namun, model ini cenderung kurang memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi kebijakan secara konperhensif (Wildan Fathoni, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa model kelembagaan menekankan peran penting dari pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk pendidikan. Model ini memastikan legitimasi dan kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Terkadang model ini kurang melibatkan masyarakat dan stakeholder, sehingga kebijakan yang dihasilkan mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, perlu dipadukan dengan masyarakat yang ada

2. Model sistem adalah model yang berbeda dari model kelembagaan dikarenakan dalam perumusan kebijakan untuk diterapkan, model ini melibatkan seluruh pihak mulai dari masyarakat, stakeholder kebijakan serta pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan. Sistem yang diterapkan harus mengimplementasikan solusi untuk persoalan atau permasalahan pada perkara yang bersangkutan. Tentu sistem dibuat melalui berbagai pihak yang mendukung sistem tersebut, maka suatu sistem untuk melindungi dirinya melalui tiga aspek, pertama menghasilkan output kelayakan itu memuaskan terhadap seluruh pihak, kedua menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, terakhir memiliki otoritas sebagai kekuatan pengguna (Wildan Fathoni, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa bahwa model sistem dalam analisis kebijakan pendidikan menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan dinamis karena keterlibatan seluruh pihak jika dibandingkan model kelembagaan. Dengan melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah dalam proses perumusan kebijakan, model ini mampu menangani konflik dan pertentangan melalui interaksi antar subsistem yang saling mendukung. Keberhasilan suatu sistem kebijakan ditentukan melalui output yang memuaskan, memperkuat ikatan internal serta menggunakan otoritas secara efektif. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kondisi nyata di lapangan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial-politik

3. Model Proses merupakan kebijakan yang berasal dari hal yang irasional. Terbentuknya rumusan kebijakan dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat namun yang menjadi kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat di sahkan.

Pendekatan ini mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah proses yang perlu dilakukan secara bertahap, tidak langsung atau melompat. Kebijakan pendidikan dilihat sebagai sebuah proses politik yang melibatkan beberapa kegiatan, seperti mengenali masalah dalam pendidikan, merancang usulan kebijakan pendidikan, memperoleh kekuatan hukum atau persetujuan kebijakan pendidikan, menerapkan kebijakan pendidikan, serta mengevaluasi hasil dari kebijakan pendidikan tersebut (Chanifudin, 2020).

Kelemahan pada model ini adalah cukup memakan waktu yang banyak dalam proses perumusan kebijakannya

4. Model teori elit merupakan model perumusan kebijakan melalui terbentuknya kebijakan secara langsung melalui kelompok elit saja seperti ahli kebijakan, dan kelompok massa seperti masyarakat biasa hanya bisa menerima dan menjalankan kebijakan sesuai yang telah di sahkan. Teori elit menunjukkan bahwa kebanyakan rakyat itu apatis (tak memperhatikan, dan tidak peduli) dan kurang informasi mengenai kebijakan publik. Kelompok elit yang membuat opini mengenai kebijakan tersebut terbentuk. Dengan demikian, kebijakan publik ternyata benar-benar menjadi preferensi atau keinginan yang direncanakan atau dirumuskan para elit saja (Wildan Fathoni, 2025)..

Proses pembuatan kebijakan publik itu sendiri bersifat politis karena proses ini pada dasarnya selalu dicirikan dengan terjadinya pertentangan antar berbagai kelompok politik elit yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda bahkan bertentangan satu sama lain. Dalam keadaan tersebut, informasi yang diperoleh melalui analisis kebijakan harus berdasarkan landasan yang netral, mampu dijadikan acuan bagi berbagai kepentingan sehingga suatu kebijakan publik dapat dihasilkan secara lebih objektif (Chanifudin, 2020).

5. Model Inkrementalis merupakan kebijakan dengan menganalisis kembali kekurangan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Model kebijakan ini menawarkan model yang praktis dan mudah karena terpusat kepada perbaikan ataupun pengembangan yang sudah ada, tidak membuat kebijakan baru dengan waktu yang lama.

Landasan pokok rasional model ini adalah bahwa perubahan inkremental memberikan tingkat maksimal keamanan dalam proses perubahan kebijakan. Semua pengetahuan yang bisa dipercaya didasarkan pada acara satu-satunya untuk mengambil

keputusan tanpa menimbulkan resiko yang besar melalui kebijakan yang berlanjut sesuai dengan arah tujuan kebijakan lama membatasi pertimbangan kebijakan alternatif dengan kebijakan-kebijakan yang secara relatif mempunyai tingkat perbedaan yang kecil dengan kebijakan sekarang yang berlaku (Wildan Fathoni, 2025)..

6. Model Rasional adalah model yang menggunakan pendekatan sistematis dalam pembuatan kebijakan. Tujuannya untuk memberikan manfaat sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dengan prosedur yang efisien dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Model ini didasari oleh prinsip rasionalisme dan positivisme, yaitu keyakinan bahwa masalah bisa diselesaikan melalui analisis data yang lengkap dan logis. Namun, dalam praktiknya, keputusan publik seringkali tidak sempurna karena manusia memiliki batasan dalam kemampuan berpikir rasional dan informasi yang dimiliki. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil bisa saja hanya memenuhi standar atau keinginan pembuat kebijakan tersebut. Model rasional adalah bentuk perumusan kebijakan yang didasarkan pada teori positivisme dan rasionalisme, yaitu dengan mengumpulkan data yang valid kemudian menganalisisnya secara mendalam. Dalam prosesnya, model ini menggunakan cara berpikir rasional sesuai dengan persoalan kebijakan yang dihadapi (Wildan Fathoni, 2025).
7. Model Penyelidikan Campuran merupakan model yang memiliki kelebihan yaitu melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan lebih mendalam, namun hal ini menjadikan model campuran memiliki titik lemah karena pembidikan permasalahan tersebut hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantuan (Wildan Fathoni, 2025).

Model ini merupakan model yang menggabungkan antara model rasional dan inkrimentalis, model ini cocok diterapkan dalam lingkup perumusan kebijakan yang global dan kebijakan yang mencakup segala bidang, karena pada perumusan kebijakan dengan model ini melihat dari banyak sudut pandang yang bersifat rasional maupun inkrimentalis (Chanifudin, 2020).

Permasalahan Kebijakan terhadap pembelajaran

Permasalahan di bidang pendidikan yang terus dibiarkan dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan di masa depan tentunya ini sangat berpengaruh dalam

pembelajaran dan output kepada peserta didik. Selain itu, para tokoh pendidikan juga akan kesulitan mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus dikelola dan dianalisis dengan baik, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Beberapa permasalahan pendidikan yang sering terjadi di Indonesia adalah pendidikan gratis yang belum merata dan kurang tepat sasaran, ketidaksepahaman mengenai ujian nasional, kompetensi guru yang belum berjalan dengan optimal, program sertifikasi guru yang belum berjalan maksimal, peningkatan kualitas pendidikan yang belum berjalan baik, serta biaya pendidikan yang terlalu mahal (Irwan Ghazali, 2021).

Selanjutnya ialah Sumber acuan para pembuat kebijakan pendidikan, baik formal maupun non formal yang berbeda oleh karena itu sikap kompromi / jalan tengah sering diambil sebagai alternatif untuk mengakomodasikannya. Kenyataan ini yang membuat rumusan kebijakan pendidikan sering mengambang dan tidak fokus, sehingga output dalam pembelajaran akan terasa berbeda.

Terlalu banyak maupun kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statemen kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengakibatkan permasalahan dan alternatif-alternatif yang dilaksanakan menjadi sederhana. Sedangkan banyaknya informasi menyebabkan para perumus kebijakan pendidikan dihadapkan pada kesulitan ketika bermaksud mensintesa persoalan dan alternatif yang akan dipilih. (Chanifudin, 2020).

KESIMPULAN

Model analisis kebijakan pendidikan adalah alat yang penting untuk mengevaluasi, menyusun, dan menerapkan kebijakan yang langsung memengaruhi proses belajar. Dengan pendekatan yang terstruktur, model ini membantu para pemangku kebijakan memahami permasalahan pendidikan secara lengkap, mengembangkan berbagai pilihan solusi, serta menilai dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.

Beberapa model analisis, seperti model rasional, model bertahap, dan model pemindaian campuran, menawarkan kerangka kerja yang berbeda dalam mengambil keputusan kebijakan.

Menggunakan model yang tepat akan meningkatkan keefektifan kebijakan dalam memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses belajar, serta membuat kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Secara umum, analisis kebijakan pendidikan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran karena mampu menghubungkan antara kebutuhan pasar, tujuan pendidikan nasional, dan kondisi sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anesti Rohma Wardani, F. S. (2022). Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan . *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 88-93.
- Anisa Nuraida Rahmah, A. F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 5, 1921-1928.
- Chanifudin, S. &. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. *At-Thullab: Jurnal Of Islamic Studies*, 116-133.
- Daud, Y. M. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Praktek Pembelajaran di Indonesia: A Systematic Literature Review. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 115-131.
- Dedi Susanto, S. M. (2023). Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 96-104.
- Hadi, N. M. (2023). Studi Literatur Tentang Kesulitan Belajar Matematis Siswa SMP Pada Konsep Perkalian . *Communnity Development Journal*, 1677-1682.
- Hendra Mahardika, K. C. (2023). Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal el-Fakhru, Islamic Education, Teaching and Studies*, 50-60.
- Hidayatullah, S. M. (2023). EDUCATION POLICY ANALYSIS; Literature Review. *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1-8.
- Irwan Ghazali, Z. T. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan . *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 66-77.
- Ishak, D. (2023). Education Policy: Understanding Policy Analysis in the Education Sector in Indonesia. *Educare : Journal Educational and Multimedia* , 77-82.
- Mongdong, R. J. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 352-355.
- Nisa Firdha, D. R. (2021). Studi Literatur Tentang Peningkatan Kompetensi Belajar Peserta Didik Melalui Kegiatan Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Lesson Studi. *Prosiding SEMNAS BIO 2021* , 1005-1013.
- Shelvia Permata Sari, R. R. (2023). Penerapan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 171-183.
- Tawa, A. B. (2019). KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA SEKOLAH DASAR . *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 107-117.
- Tengku Darmansah, A. A. (2025). Peran Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan*

Matematika, 94-102.

- Titin Sunaryati, A. A. (2024). Studi literatr : Analisis Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3, 10099-10104.
- Wildan Fathoni, I. W. (2025). Teori dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 03, No. 1 , 488-496.